EKONOMI MONETER ISLAM

“ Dasar pemikiran moneter dalam istem keuangan islam ”

KELOMPOK 8 :

FAUZI FRENSKY FERRY 90500119051

WULAN SARI 90500119052

**PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALLAUDDIN MAKASSAR
2020/2021**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah “EKONOMI MONETER”, yang membahas tentang “DASAR PEMIKIRAN MONETER DALAM SISTEM KEUANGAN ISLAM”. Kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan dalam makalah ini. Akhir kata, kami berharap semoga makalah ini dapat memberikan motivasi bagi siapa saja yang membaca dan memanfaatkannya.

Luwu, 05 November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

EKONOMI MONETER ISLAM	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN MASALAH.....	4
BAB II.....	5
PEMBAHASAN.....	5
A. KONSEP DASAR KEBIJAKAN MONETER.....	5
B. PENGERTIAN KEBJAKAN MONETER.....	7
C. SASARAN KEBIJAKAN MONETER ISLAM.....	8
D. SEJARAH SISTEM MONETER ISLAM.....	11
E. PENGEMBANGAN SISTEM MONETER ISLAM	12
BAB III	14
PEUNUTUP	14
A. KESIMPULAN	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Melihat sejarah asal usul sistem ekonomi dunia, ada satu kesamaan bahwa semua sistem yang ada selama ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum umat manusia. Karena semua sistem yang ada selalu diwarnai oleh ideologi para pendiri atau pendiri teori ekonomi, seperti kapitalisme, sosialisme dan ekonomi Islam, masing-masing dengan landasan idealis yang berbeda. Landasan idealisme ini memberi energi pada komponen sistem ekonomi: sumber daya, pemangku kepentingan, dan mekanisme. Pada dasarnya, ketiga faktor ini terus-menerus dipertimbangkan oleh berbagai teori ekonomi yang berkembang, metode pengelolaan sumber daya, entitas pengelolaan sumber daya, dan mekanisme yang berbeda untuk kesejahteraan umat manusia (kapitalis dan sosialis). Sedangkan dalam sistem ekonomi tradisional kesejahteraan hanya diartikan sebagai kecukupan materi (material sufficiency), dalam sistem ekonomi Islam kesejahteraan memiliki arti yang lebih luas: kecukupan materi dan immateriil. Hal ini karena manusia dalam ciptaannya terdiri dari dua unsur mental dan fisik, sehingga manusia memiliki dua kebutuhan dasar: kebutuhan fisiologis (sandang, makanan, tempat tinggal) dan psikologis, serta kebutuhan (keamanan, ketenangan, kesetiaan, rasa hormat). Kedua kebutuhan tersebut berbeda, namun saling berkaitan. Jika satu kebutuhan tidak terpenuhi, maka kebutuhan lainnya terhambat.

B. RUMUSAN MASALAH

- a. Apa itu konsep dasar kebijakan moneter
- b. Apa pengertian kebijakan moneter
- c. Apa sasaran kebijakan moneter islam
- d. Apa sejarah sistem monetr islam
- e. Bagaimana pengembangan sistem moneter islam

C. TUJUAN MASALAH

- a. Untuk mengetahui Apa itu konsep dasar kebijakan moneter
- b. Untuk mengetahui Apa pengertian kebijakan moneter
- c. Untuk mengetahui apa sasaran kebijakan moneter islam
- d. Untuk mengetahui Apa sejarah sistem moneter islam
- e. Untuk mengetahui Bagaimana pengembangan sistem moneter

BAB II

PEMBAHASAN

A. KONSEP DASAR KEBIJAKAN MONETER

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, uang berarti sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan masalah keuangan. Kebijakan moneter pada dasarnya adalah kebijakan pemerintah yang mengatur aliran uang. Oleh karena itu, kontribusi kebijakan moneter terhadap stabilitas harga sangat penting untuk mengendalikan inflasi. Pertumbuhan jumlah uang beredar perlu mengikuti pertumbuhan ekonomi sehingga secara tidak langsung dapat menurunkan tingkat pengangguran. Kebijakan moneter pada dasarnya adalah untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, neraca pembayaran) dan keseimbangan eksternal (neraca pembayaran), dan untuk mencapai tujuan ekonomi makro yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini dapat diukur dari sudut pandang kesempatan kerja, stabilitas harga, dan neraca pembayaran. Kebijakan moneter yang diusulkan adalah salah satu yang harus mengikuti tujuan stabilitas keuangan, kemakmuran ekonomi, kesempatan kerja penuh, pertumbuhan ekonomi yang optimal, dan keadilan semua. Kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah (atau bank sentral) yang mempengaruhi situasi makro melalui pasar uang. Ini adalah definisi umum, dan lebih tepatnya, kebijakan moneter dapat diartikan sebagai tindakan makro oleh pemerintah (bank sentral), yang mempengaruhi proses penciptaan kredit, yaitu kemampuan ekonomi untuk terus tumbuh sambil menahan inflasi. Dalam meningkatkan jumlah uang beredar, pemerintah menempuh kebijakan kontrak, yang biasa dikenal dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan alat kebijakan publik yang penting dalam sistem ekonomi modern dan Islam. Namun perbedaan mendasar terletak pada tujuan dan larangan riba dalam Islam. Prasyarat untuk menerapkan dan menjamin fungsi sistem moneter adalah pengawasan seluruh sistem oleh otoritas moneter. Tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk memastikan sistem moneter yang kuat. Secara efisien memenuhi kebutuhan penabung dan debitur. Oleh karena itu, tujuan kesempatan kerja penuh, di mana peningkatan pertumbuhan ekonomi mendorong tabungan masyarakat sebagai sumber pendanaan yang lebih banyak untuk investasi perusahaan, disebut kebijakan ekonomi sisi penawaran, dengan memberikan

¹insentif pajak kepada bisnis. Mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan bisnis Anda. Stabilitas diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesulitan perencanaan jangka panjang. Tingkat harga harus stabil, karena fluktuasi suku bunga menciptakan ketidakpastian ekonomi dan dapat menyebabkan kesulitan perencanaan jangka panjang. Fluktuasi tingkat suku bunga menyulitkan konsumen untuk memutuskan apakah akan membeli sekarang atau di masa depan. Bank sentral perlu mengekang kenaikan suku bunga untuk merangsang permintaan uang konsumen. Mengenai langkah-langkah kebijakan moneter, ada beberapa teori tentang permintaan uang, dan Islam mengklasifikasikannya ke dalam tiga cara berpikir.

- Mazhab pertama. Iqtishōduna, pendukung mazhab ini antara lain Dr. Kadin Sard, Dr. Bagir al Hasani dan Dr. Abas Murakhor, mazhab ini memandang bahwa jumlah uang yang beredar merupakan elastis sempurna, dimana pemerintah sebagai pemegang otoritas moneter tidak mampu untuk memenuhi jumlah uang yang beredar. Pada awal pemerintahan Islam dimana mata uang yang beredar adalah dinar dan dirham yang diimpor dari Roma dan Persia, dimana nilai tukar pada saat itu yang berlaku adalah satu dinar sebanding dengan sepuluh dirham.
- Mazhab kedua. bahwa penawaran uang dalam Islam sepenuhnya dikontrol oleh negara sebagai pemegang monopoli dari penerbitan uang yang syah (Legal Tender). Keberada Baitul Mall semasa awal pemerintahan Islam merupakan prototype dari bank sentral yang selama ini. Keberadaan bank sentral untuk menerbitkan mata uang dan menjaga nilai tukar agar dapat berada pada tingkat harga yang stabil. Negara melakukan sendiri kontrol terhadap penerbitan uang dan kepemilikan atas semua bentuk uang baik logam, kertas atau kredit.
- Mazhab ketiga. Mazhab alternatif. Menurut mazhab ini, permintaan uang terkait erat dengan Konsep Endogeneus uang dalam Islam. Konsep ini dalam Islam diartikan sebagai refresentatif dari volume transaksi yang ada dalam sektor riil. Konsep ini menjembatani dan tidak mendikotomi antara pertumbuhan uang disektor meneter dan sektor ril. Dengan demikian kebijakan moneter yang dikelola dengan baik akan menghasilkan tingkat perekonomian yang stabil

¹ Umar, M. C. (2000). Sistem Moneter Islam. *Jurnal Studi Islamika*, 2(2), 221-260.

melalui mekanisme transmisi pada harga dan output yang pada akhirnya membawa dampak pada.

B. PENGERTIAN KEBJAKAN MONETER

Kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah (atau bank sentral) yang mempengaruhi situasi makro melalui pasar uang. Ini adalah definisi umum dari kebijakan moneter, atau lebih tepatnya, kebijakan moneter dapat diartikan sebagai tindakan makro-negara. Dalam hal ini, bank sentral mempengaruhi proses penciptaan kredit. 3 Tahun 2004 menyatakan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia antara lain untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang diatur dengan pengelolaan jumlah uang beredar dan pengaturan jumlah uang beredar negara. Kedaulatan mata uang biasanya terletak pada bank sentral negara tersebut. H. Kebijakan moneter adalah sarana bank sentral yang sengaja dirancang untuk mempengaruhi variabel keuangan seperti suku bunga dan jumlah. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas nilai uang baik terhadap faktor internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga, dan merupakan tujuan akhir dari pencapaian tujuan pembangunan nasional seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi riil yang optimal, dan stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter sangat sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Aulia Pohan dalam kamus keuangan dan perbankan, dikoordinasikan oleh otoritas keuangan untuk menjaga keseimbangan mata uang dan stabilitas nilai moneter, dan untuk mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, yang didefinisikan sebagai rencana dan tindakan. Memperluas kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, kebijakan moneter dalam hal ini adalah sarana kebijakan ekonomi makro yang dimiliki oleh bank sentral, mengatur pendanaan, kredit, suku bunga, biaya dalam perekonomian dan/atau biaya.²

² Umar, M. C. (2000). Sistem Moneter Islam. *Jurnal Studi Islamika*, 2(2), 221-260.

C. SASARAN KEBIJAKAN MONETER ISLAM

Tujuan sistem moneter dapat dibaca dari maksud atau tujuan kebijakan moneter, dan intervensi negara dalam kegiatan ekonomi dalam arti politik dibagi menjadi dua bentuk utama politik: kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, Kebijakan fiskal menjadi perangkat penting bagi negara sejahtera, kebijakan ini mencakup pengeluaran untuk kepentingan umum, pajak progresif dan pinjaman untuk merealisasikan tujuan yang di cita-citakan. Pengeluaran umum bukan hanya untuk fungsi tradisional sebagaimana yang telah diakui, tetapi juga untuk fungsi negara sejahtera dalam meningkatkan pertumbuhan, stabilitas ekonomi dan persamaan pendapatan yang lebih besar.³ Kebijakan moneter pada umumnya merupakan kebijakan otoritas keuangan yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara stabilitas nilai mata uang dan mendorong pertumbuhan dan kelancaran produksi mata uang dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perbedaan antara kebijakan moneter tradisional dan kebijakan moneter Islam terletak pada mekanisme dan penggunaan instrumen kebijakan moneter untuk mencapai tujuan kebijakan moneter. Akibatnya, kebijakan moneter Islam tidak mengizinkan penggunaan suku bunga pada instrumen keuangan. Bank dan sistem moneter, seperti aspek kehidupan Islam lainnya, harus dirancang untuk membantu mencapai tujuan utama sosio-ekonomi Islam. Sistem harus terus menjalankan fungsi utamanya dalam kaitannya dengan area dan fungsi tertentu seperti sistem peran lainnya. Sebagai aturan umum, tujuan kebijakan moneter Islam sangat luas, tetapi setidaknya tujuannya meliputi:

1. Kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi

Penggunaan sumber-sumber daya manusia secara penuh dan efisien harus menjadi sasaran tak terpisahkan dari sistem Islam, karena hal itu akan membantu merealisasikan bukan saja tujuan kesejahteraan ekonomi berbasis luas, tetapi juga menanamkan dalam diri manusia martabat yang dituntut oleh statusnya sebagai khalifah. Demikian juga pemanfaatan secara efisien dan optimal terhadap sumber-sumber daya adalah sasaran yang substantif, karena menurut Islam semua sumber daya di bumi dan langit diperuntukan bagi kesejahteraan manusia dan perlu

³ Samsul, S., Hamid, N. M., & Nasution, H. G. (2019). Sistem Pengendalian Inflasi dalam Sistem Ekonomi Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(1), 16-28.

dieksploitasi secara memadai, tanpa menimbulkan eksekse dan kemubaziran untuk dipergunakan bagi tujuan manusia diciptakan. Mereka yang tidak dapat bekerja layak tanpa stigma dan prasangka diberikan bantuan secukupnya yang dimasukkan ke dalam program solidaritas sosial Islam. Laju pertumbuhan ekonomi yang optimal harus menjadi tujuan alami dari kebijakan-kebijakan yang menimbulkan pemanfaatan sumber-sumber daya manusia dan alam secara efisien dan penuh serta bagi kesejahteraan ekonomi berbasis luas, namun laju pertumbuhan itu sendiri tidak terlalu penting. Hal ini disebabkan tuntutan untuk mencapai kemakmuran material dalam kerangka nilai-nilai Islam yang menghendaki:

1. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh dicapai lewat produksi barang dan jasa yang merusak alam atau dengan moral hazard.
2. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh memperlebar kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin dengan mendorong konsumsi yang mencolok.
3. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh menimbulkan bahaya kepada generasi sekarang atau yang akan datang dengan memerosotkan lingkungan fisik dan moral mereka.

Pertumbuhan ekonomi selayaknya merupakan kontribusi dari sumber daya manusia yang ada, bukan dari orang-perorang atau dari perusahaan tertentu, karena hal ini berkaitan erat dengan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi hanya disumbang oleh sebagian kecil dari penduduk suatu negara, maka distribusi pendapatan juga akan dinikmati oleh sebagian kecil penduduk, oleh karena itu sasaran yang tidak boleh dilupakan dari sistem moneter Islam adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi disumbang oleh sumber daya manusia yang tersedia, meskipun tidak semua akan mempunyai peran yang sama.⁴

2. Keadilan sosio ekonomi dan pemerataan distribusi kekayaan dan pendapatan

Keadilan sosio-ekonomi terwujud ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan distribusi pendapatan yang merata. Selain itu sistem moneter Islam, berupaya supaya tidak ada ketimpangan. Harta harus terdistribusi dan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat baik dalam bentuk konsumsi atau

⁴ Statistik, B. P. (2014). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Berita resmi statistik*, 17(16/02), 1-9.

distribusi. Di antara sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan distribusi (tadāwul) ini diantaranya:

1. Islam mensyariatkan akad-akad baik akad bisnis (mu'awwadah) ataupun akad sosial (tabarru') agar setiap harta bisa berpindah tangan dari satu pihak ke pihak lain.
2. Islam membolehkan akad-akad yang sedikit mengandung gharar seperti akad salam sebagai rukhsah (keringanan) sehingga harta bisa berpindah kepemilikan dengan akad-akad ini.
3. Islam mensyariatkan akad-akad yang bersifat luzūm tanpa pilihan, kecuali jika disepakati ada syarat dalam akad.
4. Islam melarang penimbunan uang, karena jika uang tidak beredar, maka akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan keuangan, perdagangan dan sosial.
5. Islam melarang setiap bentuk riba, karena menghilangkan sikap simpati para pelaku riba terhadap sesama dan karena seluruh tujuannya adalah mendapatkan harta dari sekian banyak orang.
6. Islam melarang perjudian karena mengurangi bahkan merugikan produksi, sehingga tujuan investasi tidak tercapai, karena harta akan terkonsentrasi pada kegiatan judi.

Pada dasarnya dari keterangan di atas, tujuan terdistribusinya harta adalah supaya peredaran uang tidak hanya beredar pada orang kaya saja, namun juga pada seluruh lapisan masyarakat, sehingga harta lebih bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat.

3. Stabilitas nilai tukar mata uang

Stabilitas dalam nilai tukar mata uang (nilai kurs) harus menjadi tujuan utama dari kerangka sistem moneter Islam, karena penekanan Islam yang begitu tegas kepada kejujuran dan keadilan dalam interaksi antar manusia. Secara praktis bahwa gejolak yang ada pada nilai kurs (nilai tukar mata uang) akan menyebabkan terganggunya daya beli masyarakat, yang pada akhirnya kegiatan ekonomi (jual beli) juga akan terganggu. Dan bila nilai kurs terus menurun maka dampak akhirnya adalah menurunnya pendapatan nasional.

4. Mobilisasi investasi dan tabungan untuk pembangunan perekonomian

Sasaran mobilisasi tabungan memang perlu, karena Islam secara tegas mengecam penimbunan harta dan menuntut penggunaan sumber-sumber daya bagi tujuan-tujuan produktif dalam rangka merealisasikan sasaran-sasaran ekonomi Islam. Walaupun demikian tidak semua penabung (penyimpan) menggunakan tabungannya untuk tujuan-tujuan produktif. Karena itu ajaran Islam menganjurkan adanya lembaga-lembaga keuangan yang terorganisir untuk memobilisasi harta yang menganggur (*idle of fund*) dan menyalurkannya secara efektif pada usaha-usah produktif. Institusi demikian harus dilengkapi secara memadai agar mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan non inflasioner kepada sektor swasta maupun pemerintah untuk mencapai sasaran-sasaran ekonomi. Mengingat lembaga-lembaga ini tidak beroperasi berdasarkan riba/bunga, tetapi akan berpartisipasi dalam keuntungan dan kerugian (bagi hasil), maka perlu diorganisasikan dalam suatu cara yang efisien dan beragam sehingga mampu menghasilkan keuntungan bersih yang akan dibagikan kepada para deposan dan pemegang saham.

5. Memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan dari sistem perbankan.

Sistem keuangan dan perbankan tidak saja harus mampu memobilisasi tabungan secara efektif dan mengalokasikannya secara efisien bagi usaha-usaha produktif untuk memenuhi kebutuhan sektor riil, namun juga mampu mengembangkan pasar uang, primer dan sekunder. Pengembangan pasar uang primer dan sekunder sangat penting bagi mobilisasi sumber-sumber daya finansial secara efisien. Hadirnya pasar-pasar primer diperlukan untuk menyediakan sumber-sumber daya keuangan bagi mereka yang mempergunakannya secara produktif, sedangkan kehadiran pasar sekunder diperlukan untuk membantu para penabung dan investor mencairkan investasi mereka mana kala dirasa perlu melakukan hal itu.

D. SEJARAH SISTEM MONETER ISLAM

Saat ini, sistem moneter paling populer di dunia telah melewati beberapa era evolusi. Sistem moneter yang berlaku pada masa Nabi Muhammad SAW adalah standar bimetal untuk kelangsungan peredaran emas dan perak (dinar dan dirham). Kekhalifahan Umayyah Kedua (41 132 H / 662750 M) Ketika Dinar dan Dirham, dan Bani Basya berkuasa (132656 H / 7501258 M), rasionya kurang dari 1:15 1. Karena rasio dinar

terhadap dirham terus menurun, nilai tukar antara dinar dan dirham telah berfluktuasi⁵ secara signifikan dari waktu ke waktu di berbagai belahan dunia Islam. Rasionalnya sangat rendah, mencapai 1:35 bahkan 1:50. Menurut Al-Maqrizi (f. 845 H / 1442 M) dan muridnya Al Asadi (meninggal setelah 854 H / 1450 M) Ketidakstabilan ini telah digantikan atau diketahui digantikan oleh Hukum Gresham (Hukum Gresham). Amerika Serikat mengadopsi bimetal ini pada tahun 1792. Kemudian pada tahun 1873 Amerika Serikat mengeluarkan perak dari peredaran uang karena fluktuasi harga antara emas dan perak. Pada tahun 1880, standar internasional dan sebagian besar negara beralih dari bimetal dan monometal perak ke standar emas, menggunakan emas sebagai dasar mata uang mereka. Di bawah standar ini, nilai mata uang suatu negara secara hukum ditentukan oleh berat tetap emas, dan otoritas mata uang diharuskan untuk mengubah permintaan mata uang domestik menjadi emas pada tingkat yang disyaratkan oleh hukum. Secara historis, gerakan monetaris, yang menekankan fungsi moneter, dimulai oleh Milton Friedman, diikuti oleh ekonom dari Federal Reserve Bank St. Louis, Bruner, dan Metzeler. Langkah ini awalnya merupakan reaksi kelompok atas kegagalan kebijakan stabilisasi makroekonomi Keynes pada 1960-an terhadap krisis di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Penolakan politisi moneter terhadap Depresi dipicu oleh pernyataan mereka bahwa kebijakan moneter untuk menetralkan krisis ekonomi tidak efektif. Menurut kelompok monetaris, ada hubungan yang erat dan relatif stabil antara perubahan jumlah uang beredar dan perubahan di negara tersebut. Kebijakan ekonomi, menurut mereka, harus didorong untuk ditempatkan pada kebijakan moneter, karena mereka juga menolak campur tangan negara. Dalam perjalanan selanjutnya, gerakan dan promosi kelompok monetaris ini akan menjadi bank sentral dan dunia akademik. Dalam arti tertentu.

E. PENGEMBANGAN SISTEM MONETER ISLAM

Pada dasarnya sistem mata uang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan sistem mata uang masyarakat. Perkembangan sistem mata uang merupakan kewenangan mata uang dari perkembangan standar mata uang, produk mata uang, dan sistem pembayaran yang digunakan. Dan perkembangan sistem moneter di bidang moneter akan menghadapi permasalahan moneter yang spesifik sesuai dengan

⁵ Narullah, A. (2016). Sistem Moneter Islam: Menuju Kesejahteraan Hakiki. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 13(2), 272-287.

kebutuhan zaman dan masyarakat. Kesimpulan berikut dapat ditarik dari sistem ⁶moneter Islam.

1. Pertama, tujuan sistem moneter Islam antara lain: kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal, keadilan sosio-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata, stabilitas nilai tukar mata uang, mobilisasi investasi dan tabungan untuk pembangunan. perekonomian serta memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan dari sistem perbankan.
2. Kedua, tujuan-tujuan kebijakan moneter itu tidak dapat dicapai tanpa adanya suatu strategi yang tepat. Di sinilah Islam memiliki keunggulan nyata, bukan saja tujuan-tujuan yang merupakan bagian integral dari ideologi Islam, tetapi juga sebagian strategi merupakan dari syariah dan tidak dapat dipisahkan.
3. Ketiga, Instrumen kebijakan moneter Islam terbagi menjadi tiga mazhab berdasarkan zaman dan kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Instrumen yang diperkenalkan oleh mazhab iqtisāduna adalah Promissory Notes atau Bill Of Exchange semacam surat untuk mendapatkan dana segar.

Ciri utama sistem moneter Islam adalah tidak meninggalkan ideologi ekonomi Islam dan kepentingan ekonomi pelaku ekonomi, yaitu kebutuhan bagi hasil, dalam sarana politiknya. Diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia akan produk material dan immaterial guna mencapai kesejahteraan yang hakiki. Karena Islam didasarkan secara ketat, stabilitas nilai tukar harus menjadi tujuan utama dari kerangka sistem moneter Islam. Tentang kejujuran dan keadilan dalam transaksi antar manusia. Pada kenyataannya, fluktuasi nilai tukar (kurs mata uang) mengganggu daya beli masyarakat yang pada gilirannya mengganggu kegiatan ekonomi (jual beli). Dan jika nilai tukar terus turun, efek akhirnya adalah penurunan pendapatan nasional.

⁶ Abbas, A. (2012). Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-nilai Dasar, dan Instrumental. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 4(1).

BAB III

PEUNUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam kasus yang ideal, sistem ekonomi dapat menghasilkan kesejahteraan umum. Dalam ekonomi Islam, negara memainkan peran penting dalam melindungi kepentingan publik: jaminan sosial, keseimbangan sosial dan intervensi negara. Jaminan sosial berarti bahwa negara bertanggung jawab atas taraf hidup semua orang dalam masyarakat Islam. Keseimbangan berarti intervensi pemerintah terjadi ketika distribusi pendapatan penduduk tidak dibandingkan dan pasar tidak menjalankan fungsi utamanya. Hal ini karena pasar dapat dijalankan secara tidak adil (melalui penipuan) agar pihak-pihak tertentu mengabaikan nilai sosial dan mencari keuntungan.). Oleh karena itu, dalam Islam, persoalan ekonomi tidak selalu diserahkan kepada swasta saja, dan pemerintah boleh menjadi entitas utama, tetapi untuk kepentingan masyarakat umum, prinsip kepemilikan ada pada sistem ekonomi. pembangunan, dan sistem moneter Islam adalah bagian dari satu sistem ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2012). Sistem Ekonomi Islam, Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-nilai Dasar, dan Instrumental. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 4(1).
- Adiwarman. (2007). *Ekonomi Mkaro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Narullah, A. (2016). Sistem Moneter Islam: Menuju Kesejahteraan Hakiki. *Jurnal Studi Islamika*, 13(2), 272-287.
- Samsul, S., & Nasution, N. M. (2019). Sistem Pengendalian Inflasi Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(1), 16-28.
- Statistik. (2014). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Berita Resmi Statistik*, 17(16), 1-9.
- Umar, M. C. (2000). Sistem Moneter Islam. *Jurnal Studi Islamika*, 2(2), 221-260.